E-ISSN 3047-0714
P-ISSN 3047-1451

Volume 3 Nomor 1 2025

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL CONFERENCE ON
INDONESIAN PHILOSOPHY AND THEOLOGY
"Perjumpaan: Pendekatan Filosofis dan Humaniora"
Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Peran Agama dalam Demokrasi dari Perspektif Fukuyama dan Kontekstualisasinya bagi Politik di Indonesia

Bernardus Ario Tejo Sugiarto [a, 1]
[a] *Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia*
[1] *b.ario.tejo.s@unpar.ac.id*

Kata Kunci:
Demokrasi, Liberal, Nilai Moral Universal, Peran Agama, Politik

Abstrak

Agama dan demokrasi sering dipertentangkan dalam hal sistem legitimasi kekuasaan. Dasar legitimasi kekuasaan dari perspektif agama berasal dari atas atau dari Tuhan sendiri, sedangkan dasar legitimasi kekuasaan dari perspektif demokrasi berasal dari bawah atau dari rakyat. Agama menggunakan penalaran iman atau keyakinan, sedangkan demokrasi menggunakan penalaran yang bersifat rasional. Fukuyama berpendapat bahwa sistem demokrasi liberal merupakan sistem legitimasi kekuasaan yang paling sesuai dengan masyarakat modern yang sekular. Dalam konteks politik Indonesia, agama dan demokrasi tidak dapat dipisahkan begitu saja karena rakyat yang terlibat di dalam demokrasi adalah manusia-manusia yang ber-Tuhan dan beragama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius yang menggunakan sistem demokrasi untuk melegitimasi kekuasaan. Penghayatan agama sudah menyatu ke dalam semua aspek kehidupan bangsa Indonesia termasuk kehidupan sosial dan politik. Namun demikian, agama tidak pernah menjadi dasar untuk mengatur negara. Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus menyelidiki peran agama di dalam proses demokrasi dari perspektif Fukuyama. Persoalan-persoalan penelitian adalah: 1) apakah sumbangan agama dalam praktik demokrasi, 2) apakah batasan keterlibatan agama dalam praktik demokrasi, 3) bagaimana kontekstualisasinya dalam praktik demokrasi di Indonesia yang mempunyai kekhasan dalam pluralitas agama. Penelitian ini merupakan studi literatur terhadap karya-karya Fukuyama dari tahun 1992 sampai dengan 2018 yang membahas dinamika hubungan negara dan agama. Tujuan penelitian adalah memberikan penilaian kritis terhadap peran agama

DOI: https://doi.org/10.24071/snf.v3i1.10281
https://e-journal.usd.ac.id/index.php/senafil
Email: seminafilsafat.teo@usd.ac.id

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

dalam praktik demokrasi di Indonesia dari perspektif Fukuyama. Agama simbol kehadiran Sang Transenden. Dengan hadirnya agama, manusia tetap diingatkan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan duniawi sehingga manusia tidak semena-mena dalam menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, agama harus mempertahankan posisinya di luar demokrasi. Ketika agama terlibat di dalam kekuasaan politik secara praktis, maka agama akan diletakkan di bawah kekuasaan manusia dan digunakan sebagai sekadar alat legitimasi kekuasaan.

The Role of Religion in Democracy from Fukuyama's Perspective and its Contextualization for Politics in Indonesia

Keywords:
Democracy, Liberal, Politics, Role of Religion, Universal Moral Values .

Abstract

Religion and democracy are frequently opposed in terms of the power legitimacy system. The basis of power legitimacy from religious perspective comes from above or from God Himself, while the basis of power legitimacy from democratic perspective comes from below or from the people. Religion uses reasoning of faith or belief, while democracy uses rational reasoning. Fukuyama contends that the liberal democratic system is the most appropriate system of power legitimacy for a modern secular society. In the context of Indonesian politics, religion and democracy cannot be separated simply because the people involved in democracy are people who believe in God and are religious as well. Indonesian society is a religious society that uses a democratic system to legitimize power. The experience of religion has been integrated into all aspects of Indonesian life including social and political life. However, religion has never been the basis for governing the country. In this study, the researcher specifically investigates the role of religion in the democratic process from Fukuyama's perspective. The research issues are: 1) what is the contribution of religion in the practice of democracy, 2) what are the limits of religious involvement in the practice of democracy, 3) how is its contextualization in the practice of democracy in Indonesia which has its own characteristics in religious plurality. This research is a literature study of Fukuyama works from 1992 to

2018 which discusses the dynamics of state and religious relations. The purpose of the study is to provide a critical assessment of the role of religion in the practice of democracy in Indonesia from the Fukuyama perspective. Religion is a symbol of the presence of The Transcendent. With the presence of religion, humans are still reminded that there is a higher power than worldly power so that humans are not arbitrary in exercising their political power. Therefore, religion must maintain its position outside the practice of democracy. When religion is involved practically in political power, religion will be placed under human power and used as a means of legitimacy of power.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Ada berbagai macam agama dan kepercayaan yang dihayati oleh masyarakat Indonesia. Paling sedikit ada 6 agama[1] dan sekitar 187 aliran kepercayaan yang diakui oleh pemerintah.[2] Penghayatan agama atau kepercayaan sudah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Di bidang pendidikan, ada banyak sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menggunakan ajaran dan spiritualitas keagamaan sebagai dasar pendidikan, seperti sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Islam, dan lain-lain. Pada tingkat perguruan tinggi, ada banyak universitas yang menggunakan ajaran dan spiritualitas keagamaan sebagai dasar pendidikan, seperti universitas-universitas Katolik, universitas-universitas Kristen, universitas-universitas Islam, dan lain-lain.

Di bidang kesehatan, ada banyak rumah sakit yang menggunakan ajaran dan spiritualitas keagamaan sebagai dasar semangat pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien, seperti rumah sakit Katolik, rumah sakit Kristen, rumah sakit Islam, dan lain-lain. Di bidang keuangan, ada banyak bank yang menggunakan ajaran dan spiritualitas keagamaan sebagai dasar pengelolaan keuangan, seperti bank-bank syariah dan koperasi-koperasi Katolik.

Selain itu, dalam sistem kalender tahun 2024, pemerintah Indonesia menetapkan 17 hari libur nasional dengan 14 hari libur di antaranya berkaitan dengan perayaan keagamaan. Apalagi, hari libur nasional tersebut masih

[1] Agama, website: https://indonesia.go.id/profil/agama, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.

[2] Kemenag Patuhi dan Dukung Putusan MK tentang Aliran Kepercayaan, website: https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-patuhi-dan-dukung-putusan-mk-tentang-aliran-kepercayaan-wllfxb, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.

ditambah dengan 10 hari cuti bersama yang semuanya berkaitan dengan perayaan keagamaan.[3] Dengan demikian, sistem penanggalan di Indonesia yang terdiri dari 12 bulan memiliki hampir 1 bulan hari libur nasional untuk keperluan keagamaan. Semua realitas ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat lepas dari penghayatan agama dan kepercayaan.

Dinamika kehidupan sosial dan politik di Indonesia juga tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh agama mulai dari penentuan ideologi partai, proses pemenangan suara, sampai dengan pelantikan pejabat-pejabat pemerintahan. Di antara partai-partai yang menjadi peserta pemilu, selalu ada beberapa partai yang menggunakan ajaran keagamaan tertentu sebagai dasar dari gerakan-gerakan sosial dan politik. Dalam proses pemenangan pemilihan-pemilihan umum, tidak jarang doktrin-doktrin agama digunakan untuk mengarahkan atau melarang pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai, kelompok, atau calon tertentu. Hukuman bagi pemilih yang tidak mematuhi doktrin-doktrin tersebut adalah tidak mendapatkan pelayanan-pelayanan keagamaan bagi kesejahteraan hidup rohaninya.

Dalam proses pelantikan pejabat-pejabat pemerintahan, sumpah jabatan selalu dilakukan di bawah naungan Kitab Suci dari agama pejabat yang dilantik. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan jabatan-jabatan tersebut tidak hanya dilakukan di hadapan bangsa Indonesia tetapi terlebih-lebih di hadapan Sang Maha Tinggi.

Masyarakat Indonesia selalu berkeyakinan bahwa kehidupan bangsa Indonesia merupakan hasil campur-tangan Sang Ilahi dan bukan hanya usaha manusia belaka. Hal ini dapat disimpulkan dari Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi:

> Atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.[4]

Keyakinan akan Tuhan yang satu dan disembah oleh banyak agama dan kepercayaan sudah menjadi bagian dalam ideologi bangsa. Keyakinan ini tertulis di dalam Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun masyarakat Indonesia menempatkan Tuhan di tempat yang paling luhur dan mulia, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara agama, suatu negara yang didasarkan pada ideologi agama tertentu. Semua agama dan

[3] Daftar Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2024, website: https://indonesiabaik.id/infografis/daftar-hari-libur-dan-cuti-bersama-tahun-2024, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.

[4] Pembukaan UUD 1945, website: https://tni.mil.id/pages-4-pembukaan-uud-1945.html, diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.

kepercayaan memiliki kedudukan, perlakuan, dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, setiap warga negara juga memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut.[5]

Namun, ada realitas yang ironis di dalam kehidupan sosial politik bangsa dan negara Indonesia. Kehidupan religius yang begitu kuat ini ternyata tidak mampu membendung arus korupsi yang begitu besar dalam praktik pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Syakirun Ni'am dalam artikelnya mencatat ada 10 korupsi terbesar di Indonesia, yaitu: 1) Korupsi Tata Niaga Timah, tahun 2015-2022, yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 300 Triliun; 2) Korupsi Tata Kelola Minyak di Pertamina, tahun 2018-2023, yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 193,7 Triliun; 3) Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tahun 1998-2000, yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 138 Triliun; 4) Korupsi Duta Palma, tahun 2003-2022, yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 78 Triliun; 5) Korupsi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), tahun 2009-2011, yang merugikan negara sekitar Rp 37,8 Triliun; 6) Korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia (Asabri), tahun 2012-2019, yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 22,7 Triliun; 7) Korupsi PT Jiwasraya, Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tahun 2008-2019, yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 16,8 Triliun; 8) Korupsi Ekspor Minyak Sawit Mentah, tahun 2021-2022, yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 12 Triliun; 9) Korupsi Pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600, tahun 2011-2021, di Garuda Indonesia yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 9,37 triliun; 10) Korupsi Proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, tahun 2020-2022, yang merugikan negara sebesar sekitar Rp 8 triliun.[6]

Denny JA membuat suatu analisis statistik atas 111 negara tentang hubungan antara pandangan tentang pentingnya agama dan kemungkinan terjadinya korupsi di dalam suatu negara. Dalam analisis ini, Denny JA menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah orang di suatu negara yang menganggap bahwa agama itu penting maka semakin tinggi angka tindakan

[5] Bdk. UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

[6] Syakirun Ni'am, "Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia", website: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/14210521/daftar-10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia?page=all, diakses pada Jumat, 16 Mei 2025. Bdk. Dian Rahma Fika dan Jihan Ristiyanti, "10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia, Terbaru Minyak Mentah", 26 Februari 2025, website: https://www.tempo.co/ekonomi/10-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia-terbaru-minyak-mentah--1212298, diakses pada Jumat, 16 Mei 2025.

korupsi di negara tersebut. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah jumlah orang di suatu negara yang menganggap bahwa agama itu penting maka semakin rendah pula angka tindakan korupsi di negara tersebut. Di Indonesia, ada suatu fakta yang ironis bahwa pada tahun 2011 kementerian Agama pernah menjadi kementerian yang paling korup.[7] Agama seolah-olah sudah kehilangan wibawanya sebagai institusi yang menjaga moral bangsa.

Fukuyama, seorang ilmuwan politik dari Amerika, menganalisis secara kritis berbagai macam relasi antara agama dan negara yang pernah berkembang di dalam sejarah dan konsekuensi sosial politis yang ditimbulkan di dalam setiap relasi tersebut terhadap agama dan negara. Dalam penelitian yang berjudul "Peran Agama dalam Demokrasi dari Perspektif Fukuyama dan Kontekstualisasinya bagi Politik di Indonesia," peneliti menjelaskan kepada pembaca peran agama di dalam demokrasi dari sudut pandang pemikiran Fukuyama. Setelah itu, berdasarkan pemikiran Fukuyama tersebut, peneliti menganalisis secara kritis hubungan antara agama dan negara yang terjadi di Indonesia. Pada akhir pembahasan, peneliti memberikan kesimpulan dan saran yang bersifat konstruktif tentang peran agama dalam demokrasi di Indonesia. Rumusan-rumusan persoalan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana Fukuyama menjelaskan tentang peran agama di dalam demokrasi dan bagaimana pemikiran Fukuyama ini digunakan untuk melihat hubungan antara agama dan demokrasi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini merupakan studi literatur terhadap karya-karya Fukuyama yang membahas persoalan tentang hubungan agama dan demokrasi.

Isi

Hubungan antara Kodrat Manusia dan Negara

Fukuyama berpandangan bahwa manusia secara kodrati adalah makhluk sosial (*homo sociologus*), makhluk yang memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok secara alamiah. Dorongan kodrat tersebut menyebabkan manusia dengan sendirinya dan tanpa perlu dipaksa akan mencari sesamanya untuk membangun sebuah kehidupan bersama dalam komunitas. Manusia tidak perlu mengambil sebuah keputusan untuk hidup berkomunitas. Manusia adalah sahabat bagi sesamanya manusia (*homo homini socius*). Tanpa adanya agama dan negarapun, manusia tetap akan hidup bersama. Agama dan negara bukan menjadi penyebab keteraturan sosial dalam masyarakat.

[7] Denny JA, PhD, *Sosiologi Agama di Era Artificial Intelligence, 7 Prinsip* (Cheyenne, Wyoming, USA: Cerah Budaya International, 2025), 12-13.

> We can expect this to happen for a simple reason: human beings are by nature social creatures, whose most basic drives and instincts lead them to create moral rules that bind themselves together into communities. They are also by nature rational, and their rationality allows them to create ways of cooperating with one another spontaneously. Religion, often helpful to this process, is not the sine qua non of social order, as many conservatives believe. Neither is a strong and expansive state, as many on the Left argue.[8]

Pandangan Fukuyama tersebut bertolak belakang dengan pandangan Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa manusia secara kodrati adalah serigala bagi sesamanya manusia (*homo homini lupus*). Manusia adalah individu-individu yang memiliki kecenderungan untuk menyendiri dan hidup secara terisolir. Manusia selalu memandang sesamanya manusia sebagai suatu ancaman atau seorang musuh bagi dirinya sehingga manusia harus melawan dan menyerang manusia yang lain untuk mempertahankan eksistensinya. Dengan demikian, konflik, pertikaian, dan peperangan merupakan bagian yang akan selalu ada dalam dunia kehidupan manusia. Manusia harus membunuh yang lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Pemikiran Thomas Hobbes ini berjalan beriringan dengan pemikiran John Locke yang menekankan kesamaan mendasar yang ada di dalam diri setiap manusia, yaitu: kesamaan kemampuan alamiah manusia untuk membunuh. Hidup bersama dalam sebuah komunitas adalah hal yang mustahil bagi manusia. Oleh sebab itu, untuk membangun sebuah kehidupan bersama dalam komunitas, manusia perlu dipaksa untuk menyepakati kontrak-kontrak sosial. Kehidupan kebersamaan manusia dalam sebuah negara dipandang sebagai sebuah solusi dari kecenderungan manusia yang selalu berperang. Negara dengan sengaja dihadirkan untuk mendamaikan manusia-manusia saling bertikai dan saling membunuh.

Fukuyama sama sekali tidak sepakat dengan pemikiran bahwa kehidupan bernegara merupakan sebuah solusi bagi naluri membunuh manusia. Negara seolah-olah hadir untuk mendamaikan manusia-manusia yang terpecah-belah. Kekerasan manusia tidak dapat diatasi dengan kehadiran sebuah negara, tetapi negara justru meningkatkan kekerasan-kekerasan manusia ke level yang lebih tinggi dan lebih destruktif. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah-sejarah peperangan antar kelompok dalam negara dan peperangan antar negara.[9]

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga adalah makhluk rasional. Dengan kemampuannya untuk berpikir, manusia mampu mempertimbangkan

[8] Francis Fukuyama, *The Great Disruption, Human Nature and The Reconstitution of Social Order* (London: Profile Books Ltd, 1999), 15.

[9] Francis Fukuyama, The Origins of Political Order, From Prehuman Times to The French Revolution (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011), 90.

dan menciptakan cara-cara manusiawi untuk hidup bersama dengan yang lain dalam sebuah komunitas, mulai dari komunitas yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada komunitas yang lebih besar yaitu kelompok-kelompok suku. Komunitas yang jauh lebih besar lagi adalah komunitas politis atau negara.

> Human beings go much further than any other animal by creating second-and third-order hierarchies that unite families into tribes and lineages, tribes into coalitions, and finally all subordinate social units into a political community or state.[10]

Dengan demikian, eksistensi negara sesungguhnya bukan berdasarkan kodrat *homo homini lupus*, melainkan berdasarkan kodrat *homo homini socius*. Kehadiran negara bukan sebagai penyatu individu-individu yang memiliki keinginan untuk hidup sendiri melainkan sebagai penyatu individu-individu yang memiliki keinginan untuk hidup berkelompok. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan merupakan hal yang harus ada sebagai sebuah konsekuensi untuk membentuk pemerintahan dan memberikan kepadanya legitimasi kekuasaan untuk mengatur komunitas berskala besar tersebut dan mentransformasi tatanan sosial ke dalam tatanan politik.[11]

Dinamika Hubungan antara Agama dan Negara

Negara merupakan manifestasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam sebuah negara, Fukuyama membedakan dua kelompok besar yang akan selalu menuntut pengakuan kekuasaan, yaitu kelompok religius dan kelompok nasionalis. Kelompok religius akan menuntut pengakuan akan kekuasaan religius, ajaran-ajaran religius, moralitas religius, dan ritual-ritual religius yang mereka yakini sebagai dasar kekuasaan negara. Sedangkan, kelompok nasionalis akan menuntut pengakuan akan kekuasaan kelompok budaya atau etnik tertentu sebagai penguasa negara. Dua kelompok besar ini biasanya merupakan kelompok mayoritas dalam sebuah negara. Kedua kelompok ini sebenarnya sama-sama kurang rasional apabila dibandingkan dengan pengakuan yang bersifat universal dari negara liberal yang tidak terikat pada penghayatan agama tertentu dan otoritas budaya atau etnik tertentu.

Negara liberal mengakui kebebasan dan hak-hak setiap individu sehingga negara liberal lebih cenderung menjalankan sistem demokrasi dalam proses legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, dominasi agama dan nasionalisme yang sempit dipandang sebagai hambatan terhadap proses demokrasi karena

[10] Fukuyama, *The Great,* 213.
[11] Fukuyama, *The Great,* 213.

keduanya akan menyingkirkan kelompok yang lain.[12] Pandangan Fukuyama tentang pengakuan tersebut dipengaruhi oleh pemikiran dari Plato tentang bagian jiwa manusia yang disebut dengan *thymos* yang selalu menuntut penghargaan atau pengakuan atas martabat dan identitasnya. Karena tuntutan akan pengakuan ini selalu mengarah kepada konflik maka Fukuyama menekankan pentingnya nilai-nilai universal yang dapat menyatukan. [13] Kelompok religius dan kelompok nasionalis tidak memiliki nilai-nilai universal yang cukup yang dapat dijadikan sebagai landasan bersama di dalam sebuah negara liberal.[14]

Agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Agama sudah ada dalam kehidupan masyarakat primitif. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa tidak ada masyarakat primitif tanpa agama.[15] Meskipun masyarakat modern memandang agama sebagai sumber kekerasan dan perpecahan, tetapi agama dapat berfungsi untuk menyatukan masyarakat secara keseluruhan sehingga masyarakat dapat hidup secara harmonis. Agama dapat menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di masyarakat dengan ajaran-ajarannya tentang norma, nilai, kehidupan abadi, ganjaran dan hukuman. Agama memiliki ajaran yang khas yang tidak dimiliki oleh institusi-institusi yang lain. Sebagai contoh, ada ajaran umum yang mengajarkan tentang membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas kejahatan dengan kejahatan, perlakukan orang lain seperti kamu sendiri ingin diperlakukan. Ajaran ini memang bersifat rasional dan universal. Namun, agama Kristiani memiliki ajaran yang berbeda untuk menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat, yaitu ajaran membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas penganiayaan dengan doa, dan pengampunan sebanyak tujuh puluh kali tujuh kali. Dengan agama, masyarakat-masyarakat awal dapat berkembang melampaui ikatan-ikatan yang sempit.[16]

Agama memang memiliki fungsi untuk menyatukan masyarakat, tetapi apabila agama terintegrasi di dalam sistem kekuasaan negara, maka baik agama maupun negara dapat mengalami dampak negatifnya, yaitu: agama dapat memanfaatkan kekuasaan negara untuk kepentingan agama dan negara dapat memanfaatkan kekuasaan agama untuk kepentingan negara. Fukuyama

[12] Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: The Free Press A Division of Macmillan, Inc., 1992), xix.
[13] Alosius Gonsaga No, Barnabas Ohoiwutun, "Paham Politik Identitas Menurut Francis Fukuyama (Sebuah Kajian Filsafat Moral)," *Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral* Vol.3 No.2 (Juli 2024), 219, 224-225.
[14] Abdul Jabpar, "The End of History and The last Man (Sebuah Studi Deskriptif atas Pemikiran Francis Fukuyama)," *An-Nûr Jurnal Studi Islam* Vol. VII No. 2 (Desember 2015), 136.
[15] Fukuyama, *The Origins*, 36.
[16] Fukuyama, *The Origins*, 37-38.

memberikan beberapa contoh hubungan agama dan negara di dalam sejarah. Di India, negara berada di bawah kekuasaan agama. Dengan sistem kasta yang ada dalam agama, agama dapat mempengaruhi kekuasaan negara.[17] Sistem kasta menempatkan kelompok Brahmana berada di puncak hierarki. Kelompok tersebut berada di atas tiga kelompok lainnya yaitu kelompok Ksatria, Waisya, dan Sudra. Karena kedudukannya di atas kelompok Ksatria dan perannya sebagai penjaga aturan-aturan yang suci yang ada sebelum kekuasaan politik, maka kelompok Brahmana sama sekali tidak terikat dengan kekuasaan negara.[18] Bahkan kelompok Brahmana memiliki wewenang penuh atas doa-doa dan teks-teks yang diperlukan di dalam segala macam ritual termasuk untuk melegitimasi kekuasaan negara. [19] Negara harus tunduk kepada kekuasaan agama.

Di Cina, agama berada di bawah kekuasaan negara. Pemimpin negara adalah juga berperan sebagai pemimpin agama. Semua pemuka agama harus tunduk di bawah kekuasaan negara dan bahkan mereka dijadikan pegawai negara. Negara selalu memanfaatkan ritual-ritual keagamaan untuk meningkatkan kekuasaan mereka tetapi tidak pernah menempatkan pemuka-pemuka agama di atas kekuasaan negara. Otoritas agama tidak memiliki wewenang untuk menentukan pemegang kekuasaan negara. [20] Kaesaropapisme yang terjadi Cina pernah juga terjadi di Gereja Katolik setelah agama Katolik diangkat secara resmi sebagai agama negara setelah pertobatan Kaisar Konstantinus dengan memeluk agama Katolik pada tahun 313. Dengan diangkat sebagai agama negara, Gereja Katolik harus tunduk di bawah kekuasaan negara. Kepala negara yaitu kaisar adalah juga pemimpin Gereja Katolik. Kaisar sekaligus memiliki kuasa untuk mengangkat pejabat-pejabat Gereja seperti Paus dan Uskup dan sekaligus memiliki kuasa untuk memberhentikan mereka. Kaisar berkuasa untuk mengadakan konsili dan menetapkan hukum-hukum Gereja.

Pada akhir abad kesebelas, Gereja mendeklarasikan independensinya terhadap kekuasaan negara. Gereja tidak lagi terikat dengan kekuasaan negara. Gereja merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengangkat pemimpin-pemimpinnya sendiri. Pada akhir abad kedua puluh, karena munculnya aliran-aliran Islam radikal, banyak orang membandingkan dua fakta yang bertolak-belakang, yaitu: di satu pihak, Gereja di Barat terus

[17] Fukuyama, *The Origins*, 78.
[18] Fukuyama, *The Origins*, 152.
[19] Fukuyama, *The Origins*, 163.
[20] Fukuyama, *The Origins*, 160.

berupaya memisahkan diri dan menjaga independensi dari campur-tangan negara serta berupaya tidak mencampuri urusan negara, tetapi di sisi lain, negara-negara Islam berusaha untuk menyatukan agama dan negara.[21]

Berdasarkan analisisnya tentang dinamika hubungan antara agama dan negara, Fukuyama menjelaskan bahwa di luar tatanan politik, agama menjadi satu-satunya sumber hukum yang paling jelas sehingga apabila agama bersifat independen terhadap kekuasaan politik, maka hukum agama tersebut dapat membatasi kekuasaan penguasa negara. Kehadiran agama membuat penguasa negara tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Namun, apabila agama masuk dan terlibat ke dalam urusan negara, maka negara akan mengendalikan urusan agama sehingga negara akan lebih cenderung memanfaatkan agama untuk memperkuat otoritas politiknya. Agama kehilangan kewibawaannya untuk membatasi kekuasaan negara.[22] Dengan terpisahnya otoritas agama dari otoritas negara, penguasa negara akan menyadari bahwa mereka bukanlah penguasa tertinggi yang berada di atas hukum karena ada hukum agama yang berada di atas mereka. Mereka tidak punya kuasa untuk mengubahnya.[23]

Peran Agama dalam Demokrasi

Dalam pemikiran Fukuyama, demokrasi dan liberalisme merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi kedua konsep ini memiliki keterkaitan makna. Liberalisme berhubungan dengan hak-hak individu yang bersifat asasi. Demokrasi berhubungan dengan hak setiap warganegara untuk memilih dan berpartisipasi dalam kekuasaan politik. Hak untuk berpartisipasi dalam kekuasaan politik merupakan hak liberal. Demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kebebasan individu sehingga istilah demokrasi hampir selalu dihubungkan dengan istilah liberalisme. Sebuah negara dipandang demokratis apabila negara tersebut menghargai dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk memilih sendiri pemerintahannya dengan sistem pemilihan multipartai yang berkala dengan kotak suara yang bersifat rahasia. Namun, Fukuyama berpendapat bahwa proses demokrasi formal dapat dimanipulasi oleh penguasa politik sedemikian rupa sehingga partisipasi dan hak yang setara dari warga negara tidak dapat dijamin.[24]

Agama sesungguhnya memberikan pengaruh yang besar terhadap ajaran demokrasi liberal. Fukuyama mengutip pemikiran Hegel yang mengatakan

[21] Fukuyama, *The Origins*, 263-264.
[22] Fukuyama, *The Origins*, 262.
[23] Fukuyama, *The Origins*, 273.
[24] Fukuyama, *The End*, 42-43.

bahwa agama Kristiani memiliki hubungan historis yang objektif dengan munculnya masyarakat demokratis liberal di Eropa Barat. Agama Kristiani merupakan agama pertama yang berdasarkan keyakinan dan pilihan moralnya membangun prinsip kesamaan kedudukan seluruh umat manusia secara universal di hadapan Tuhan.

> Huxley suggests that one source for a definition of what it means to be a human being is religion. In Brave New World, religion has been abolished and Christianity is a distant memory. The Christian tradition maintains that man is created in God's image, which is the source of human dignity.[25]

Agama Kristiani juga mengajarkan tentang konsep kebebasan manusia yang melekat pada pribadi manusia sehingga kebebasan bukan sesuatu yang diberikan dari luar diri manusia. Karena itu, agama Kristiani dianggap sebagai *absolute religion*.[26] Konsep Kristiani bahwa *all men are created equal* menjadi dasar dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika (*The American Declaration of Independence*). Pemikiran agama Kristiani telah mempersiapkan jalan untuk Revolusi Prancis yang memperjuangkan prinsip martabat yang sama di antara semua manusia. Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa agama adalah penghalang demokrasi adalah pendapat yang keliru. Sesungguhnya agama bukan penghalang bagi demokrasi. Agama justru mendesak munculnya demokrasi. Tidak ada kontradiksi sama sekali antara prinsip agama dan prinsip demokrasi. Namun, sayangnya, agama kemudian disingkirkan karena dipandang bertentangan dengan prinsip akal budi yang diagungkan di zaman modern sampai pada akhirnya muncul sebuah kesadaran bahwa akal budi belaka ternyata tidak mampu membangun sebuah moralitas yang utuh.[27]

> The modern liberal project envisioned replacing community based on tradition, religion, race, or culture with one based on a formal social contract among rational individuals who come together to preserve their natural rights as human beings. From the earliest days of the Enlightenment, conservative thinkers like Edmund Burke and Joseph de Maistre argued that such a community could not work. Without the transcendental sanctions posed by religion, without the irrational attachments, loyalties, and duties arising out of culture and historical tradition, modern societies would come apart at the seams.[28]

Peran agama di dalam sistem demokrasi dapat dipahami dalam pemikiran Fukuyama tentang penyebab buruknya sistem demokrasi di dalam sebuah

[25] Francis Fukuyama, *Our Posthuman Future, Consequences of The Biotechnology Revolution* (New York: Farrar, Straus And Giroux, 2002), 6-7.
[26] Fukuyama, *The End*, 196.
[27] Fukuyama, *The Great*, 226.
[28] Francis Fukuyama, *Social Capital* (The Tanner Lectures On Human Values, Delivered at Brasenose College, Oxford May 12, 14, and 15, 1997), 381.

negara. Ada tiga lembaga yang sangat berperan di dalam sistem demokrasi modern, yaitu negara, aturan hukum, dan akuntabilitas demokratis. *Yang pertama*, negara menggunakan kekuasaan untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat. *Yang kedua*, aturan hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Aturan hukum ini mengikat seluruh masyarakat termasuk pemegang kekuasaan negara. *Yang ketiga*, akuntabilitas demokratis menjaga dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi penguasa negara. Keseimbangan ketiga lembaga ini harus dijaga. Di satu sisi, negara menjalankan kekuasaannya dan di sisi yang lain aturan hukum dan akuntabilitas demokratis menjaga agar negara menjalankan kekuasaannya dengan batasan-batasan tertentu dan memastikan bahwa kekuasaan benar-benar dijalankan demi kepentingan publik. Negara tanpa aturan hukum dan akuntabilitas demokratis akan menjadi diktator dan anarkis.[29]

Dalam pemikiran Fukuyama yang telah dijelaskan sebelumnya, agama dapat menjadi lembaga yang membatasi kekuasaan negara. Agama dapat menjadi sumber hukum di luar hukum yang ditetapkan oleh negara sehingga dengan demikian penguasa negara dapat terus menyadari bahwa penguasa negara tidak berada di atas hukum, melainkan tetap berada di bawah hukum. Selain itu, agama dapat menjadi lembaga yang mampu membatasi atau mengontrol kekuasaan negara. Jika penguasa negara melakukan penyimpangan kekuasaan, maka agama akan menjadi lembaga yang mampu menyeimbangkannya kembali. Memang akan selalu ada dua pemikiran yang berbeda dalam kelompok yang mendukung sistem demokrasi liberal. Kelompok yang satu akan berupaya untuk menyingkirkan agama dari dalam ruang publik dan kelompok yang lain tetap berupaya untuk mempertahankan keterlibatan agama di dalam ruang publik. Sebagai contoh, dalam proses demokrasi di Amerika, hampir semua Bapak Pendiri Amerika meyakini bahwa kehidupan religius yang kuat sangat menentukan keberhasilan proses demokrasi di Amerika. [30] Namun, tentu saja hal ini mengandaikan independensi agama terhadap kekuasaan negara. Apabila agama melebur dengan kekuasaan negara maka negara akan kehilangan penyeimbangnya dan negara akan menjalankan kekuasaannya tanpa kendali.

[29] Francis Fukuyama, "Why is Democracy Performing So Poorly?" in *Democracy in Decline?* Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.) (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015), 13.

[30] Francis Fukuyama, *Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (New York: Free Press Paperbacks, A Division of Simon & Schuster Inc., 1995), 351.

Kontekstualisasi Pemikiran Fukuyama di Indonesia

Indonesia memiliki kondisi sosial dan religius yang sangat khas sehingga Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan negara-negara lain yang bersifat monoreligius dan monokultural. Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Namun, Indonesia telah menentukan identitas nasionalnya yang dapat mengikat semua perbedaan tersebut dalam kesatuan. Dengan menentukan identitas nasional, Indonesia sekaligus menyatukan semua suku bangsa dan menyatakan diri berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain.[31] Pada tahun 1928, pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia telah menentukan identitas nasionalnya dalam Sumpah Pemuda, yaitu: bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.[32] Selain itu, Indonesia menentukan lagu kebangsaannya, Indonesia Raya. Identitas Nasional semakin diperkuat dengan ideologi Pancasila. Bagaimanapun juga, identitas nasional merupakan kekuatan yang dapat mengikat kesatuan bangsa Indonesia.

Dari perspektif religius, ideologi Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) merupakan jalan tengah dari ide-ide Karx Marx dan fanatisme agama. Marx memandang agama sebagai candu masyarakat (*the opiate of the masses*) untuk menyingkirkan agama dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sedangkan fanatisme agama berusaha untuk menyatukan agama ke dalam negara sehingga menjadi negara teokrasi. Di satu sisi, pemisahan agama dari realitas kehidupan masyarakat bukan karakter bangsa Indonesia. Di sisi lain, integrasi sebuah agama ke dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara juga bukan karakter bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah sekaligus bangsa religius dan sekaligus bangsa yang terbuka terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Negara Indonesia tidak mungkin menjadi negara sekular dan tidak mungkin menjadi negara agama. Ideologi Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah cerminan sikap religius dan sikap keterbukaan bangsa Indonesia terhadap seluruh eksistensi agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.[33] Namun, sejak Negara Indonesia berdiri, selalu saja ada gerakan untuk mengintegrasikan agama ke dalam kekuasaan negara dan gerakan untuk mengintegrasikan kekuasaan negara ke dalam agama.

---

[31] Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay, From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014), e-book, 179.
[32] Sejarah Sumpah Pemuda, https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/sejarah-sumpah-pemuda/
[33] Fukuyama, *Political Order*, 308-311.

Gerakan radikalisme dan fundamentalisme agama tidak pernah lenyap dari bumi Indonesia. Kekuatan identitas nasional terus-menerus diuji oleh kelompok-kelompok agama yang radikal dan fundamentalis.[34] Kelompok ini selalu berusaha dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan untuk mengintegrasikan agama ke dalam kekuasaan negara. Demikian juga sebaliknya, beberapa penguasa negara selalu berusaha mengintegrasikan kekuasan negara ke dalam agama. Dalam proses integrasi, agama dan kekuasaan negara sebenarnya dapat saling memanfaatkan. Agama dapat memanfaatkan kekuasaan negara untuk melegitimasi suatu ajaran agama ke dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga ajaran agama tersebut dapat diberlakukan secara publik. Pelanggaran terhadap ajaran agama tersebut dapat menjadi pelanggaran terhadap peraturan pemerintah sehingga agama melalui kekuasaan negara memiliki wewenang menjatuhkan sanksi atau hukuman.[35]

Salah satu contoh ajaran agama yang sudah masuk menjadi undang-undang adalah Jaminan Produk Halal dalam UU no. 33, tahun 2014. Setiap produsen yang mengklaim produk mereka halal harus melakukan sertifikasi halal. Namun, tidak semua setuju dengan peraturan ini, termasuk dari kelompok agama Islam sendiri karena secara teknis aturan ini rentan dengan penyalahgunaan mekanisme dalam proses sertifikasi halal, seperti pemungutan uang dari pihak-pihak tertentu untuk proses *labelling* halal. Ajaran agama tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.[36]

Selain agama dapat memanfaatkan kekuasaan negara, negara-pun juga dapat memanfaatkan agama dalam perebutan kekuasaan. Kasus pernyataan tertulis di spanduk yang terpasang di berbagai Masjid di Jakarta tahun 2017 bahwa jenazah para pendukung dan pembela Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan disholatkan merupakan contoh konkret penyalahgunaan agama

[34] Zaprulkhan mengutip kritik dari Mun'im A. Sirry terhadap pemikiran Fukuyama. Demokrasi liberal memang akan menjadi fenomena global kecuali di negara-negara muslim. Islam tidak kompatibel dengan demokrasi karena tiga faktor utama, yaitu: pemahaman doktrinal yang rigid, kultur dunia Islam yang kental dengan otokrasi dan ketaatan yang pasif, perlunya pengalaman dan waktu. Zaprulkhan, "Membangun Dialog Peradaban," *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.03, No.01 (Juli 2017), 51.

[35] Francis Fukuyama, *America at the Crossroads, Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy* (New Haven and London: Yale University Press, 2006), 70. Agus Supratikno mengutip pemikiran dari Fukuyama dari artikel yang berjudul "Why National Identity Matters," dalam *Journal of Democracy* bahwa kelompok-kelompok yang memperjuangkan identitasnya baik etnis atau agama cenderung memanfaatkan kekuasaan negara untuk kepentingannya sendiri. Agus Supratikno, "Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia." *SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan dan Teologi di Indonesia* Vol. I, No. 1 (Juni 2023), 3.

[36] *Kewajiban sertifikasi resmi halal berlaku, bagaimana nasib UMKM?*, 18 Oktober 2019, website: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006, diakses Selasa, 15 Oktober 2024.

untuk memenangkan kontestasi kekuasaan sosial politik. Praktik politik identitas menjadi tantangan utama dalam bangsa Indonesia yang memiliki heteroginitas.[37] Konflik sosial dapat dengan sengaja digeser menjadi konflik identitas.[38] Tentu saja, tidak semua kelompok setuju dengan isi spanduk tersebut, termasuk dari pihak agama Islam sendiri karena tidak ada alasan untuk tidak mensalatkan seorang Muslim hanya gara-gara beda pilihan secara politik.[39]

Politik identitas juga terbukti ampuh dalam memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019. Politik identitas yang didukung dengan strategi *post-truth* terbukti jauh lebih efektif daripada kampanye menggunakan data dan fakta.[40] Gejala-gejala bahwa agama dimanfaatkan untuk memenangkan kontestasi kekuasaan negara (*politicized religion*) tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara-negara lain seperti Hindu di India, serta Budhisme di Sri Langka dan Myanmar.[41] Oleh karena itu, proses transisi menuju sebuah demokrasi bukan merupakan titik akhir dari perjalanan sejarah politik karena demokrasi pun dapat menimbulkan ancaman-ancaman baru yang ingin menumbangkan dan memanfaatkan demokrasi itu sendiri untuk mendapatkan kekuasaan yang bersifat mutlak.[42]

Agama memiliki kekuatan ambigu, sekaligus untuk menyatukan dan memisahkan masyarakat. Agama dapat menjadi sekaligus sumber konflik dan sumber penyelesaian konflik. Tentu saja ini sangat bergantung pada siapa yang mengarahkan agama. Apabila agama ditarik ke arah partikularitasnya, agama menjadi bersifat memisahkan masyarakat. Apabila agama ditarik ke arah universalitasnya, agama menjadi bersifat menyatukan semua golongan atau kelompok.[43] Sifat ambigu ini sering digunakan di dalam dunia politik.

---

[37] Dr. Ir. H. Abdul Nadjib dan MM, Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A, eds, *Dinamika Isu-Isu Sosial Ilmu Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit IDEA Press, 2022), 328.

[38] Dinna Wisnu, Ph.D, ed., Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad Ke 21, Refleksi dari Forum Masyarakat Sipil dan Media (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2018), 9.

[39] Heyder Affan, 27 Februari 2017, *Seruan tidak mensalatkan pro-Ahok 'tak sesuai ajaran Islam'*, website: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39097303, diakses Selasa, 15 Oktober 2024.

[40] Aryojati Ardipandanto, "Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme," *Politica* Vol.11 No.1 (Mei 2020), 45-46.

[41] Francis Fukuyama, *Identity, The Demand for Dignity and The Politics of Resentment* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018), e-book, 67.

[42] Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., CBA, dkk., *Pengantar Ilmu Politik* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 78-79.

[43] Mikhael Dua mengutip pemikiran dari Pierre Rosanvalon bahwa agama memainkan peranan untuk menciptakan persaudaraan di kalangan pekerja, petani, dan intelektual yang berbeda-beda latar belakangnya sehingga masyarakat yang heterogen dapat menjadi masyarakat yang homogen. Mikhael Dua, "Demokrasi, Kontradiksi-Kontradiksinya, dan Epikeia, Perspektif Sejarah Filosofis Pierre Rosanvalon." *Jurnal Ledalero* Vol. 23, No. 1 (Juni, 2024), 31.

Di Indonesia, negara-pun dapat menarik agama untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaannya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat di bawah naungan keagamaan. Namun, keputusan ini sangat berisiko terhadap kehidupan agama itu sendiri. Sebagai contoh, negara secara kontroversial memberikan izin kepada ormas-ormas keagamaan untuk mengelola tambang yang seharusnya dilakukan negara untuk kepentingan rakyat. Hal yang paling dikhawatirkan dalam keterlibatan ormas keagamaan dalam pengelolaan tambang adalah ormas keagamaan akan mengesampingkan tugas utamanya untuk membimbing kehidupan rohani dan spiritual jemaatnya. Selain itu, ormas keagamaan akan kehilangan daya kritis dan suara profetiknya untuk menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.[44] Tidak semua lembaga keagamaan menerima tawaran pemerintah untuk pengelolaan tambang. Gereja Katolik di Indonesia melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) merupakan salah satu agama yang menolak dengan tegas tawaran pemerintah tersebut karena tugas Gereja adalah *koinonia* (persekutuan), *diakonia* (pelayanan), *kerygma* (pewartaan), *leiturgia* (perayaan iman), dan *martyria* (kesaksian).[45] Gereja Katolik memilih untuk tetap fokus dan setia pada pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pluralitas agama di Indonesia menyebabkan sikap agama dalam hubungannya dengan negara juga sangat bervariasi. Setiap agama memiliki otoritas untuk menentukan sikapnya sendiri. Ada kelompok agama yang berjuang membentuk negara agama. Ada kelompok agama yang tidak ingin membentuk negara agama tetapi hanya ingin memanfaatkan kekuasaan negara untuk melegalkan ajaran imannya. Ada kelompok agama yang benar-benar memisahkan diri dari negara karena merasa memiliki urusan yang berbeda sehingga tidak mau tahu tentang perkembangan negara. Agama mengurus hal surgawi dan negara mengurus hal duniawi. Agama dan negara merupakan dualisme yang tidak dapat disatukan. Ada kelompok agama yang bersifat independen terhadap negara tetapi sangat peduli dengan perkembangan negara dan terlibat untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan negara yang menyimpang sebab penghayatan iman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial politik. Di antara sikap agama yang ada, sikap agama yang ideal dalam pemikiran Fukuyama adalah sikap yang terakhir.

---

[44] Presiden Jokowi izinkan ormas keagamaan kelola tambang - Rawan 'konflik SARA' dan 'alat perusahaan', kata pegiat lingkungan, 3 Juni 2024, website: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo, diakses Selasa, 15 Oktober 2024.

[45] *Alasan KWI Tolak Kelola Tambang Meski Direstui Jokowi*, 06 Jun 2024, website: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240606075014-85-1106490/alasan-kwi-tolak-kelola-tambang-meski-direstui-jokowi, diakses Selasa, 15 Oktober 2024.

Dalam independensinya, agama memiliki tugas untuk menjaga negara agar dalam menjalankan tugasnya tetap menjadikan manusia sebagai tujuan dan bukan sarana. Selain itu, agama menanamkan pemahaman bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat dan bukan untuk dilayani oleh rakyat. Akhirnya, sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan di awal masa jabatannya di bawah naungan Kitab Suci, semua penguasa negara harus mempertanggungjawabkan kekuasaan negara yang dipercayakan kepadanya bukan hanya di hadapan manusia, melainkan juga di hadapan Sang Pencipta manusia.[46]

Kesimpulan

Agama sebagai sebuah lembaga religius hendaknya tidak terlibat dalam praktik perebutan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Agama akan kehilangan kewibawaan sebagai penjaga dan pengajar moralitas. Apabila agama terlibat dalam perebutan kekuasaan, maka agama akan cenderung juga menggunakan segala cara untuk memenangkan kekuasaan termasuk dengan cara memanipulasi ajaran-ajaran imannya. Dalam hal ini, agama bukan lagi menjadi sumber pencarian kebenaran, melainkan menjadi sumber pencarian pembenaran untuk praktik-praktik politik yang menyimpang. Agama dapat terlibat dalam sistem demokrasi dengan mendidik jemaatnya yang juga adalah warga negara untuk tetap menghayati nilai-nilai moralitas yang bersumber dari ajaran-ajaran iman keselamatan dalam keterlibatan mereka di dalam dunia sosial politik. Bagaimanapun juga, agama harus tetap menjaga independensinya terhadap kekuasaan negara tetapi tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh negara. Dalam sistem demokrasi, integrasi agama ke dalam kekuasaan negara akan menyebabkan negara kehilangan pembatasan kekuasaan.

Dalam konteks pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia, penelitian tentang peran agama dalam demokrasi dari perspektif Fukuyama ini dapat dilanjutkan dengan penelitian-penelitan berikutnya yang menyelidiki secara

[46] Kekhasan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Demokrasi di Indonesia harus didasari oleh rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa (sila pertama). Demokrasi di Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (sila kedua). Demokrasi di Indonesia harus menjamin persatuan dan kesatuan bangsa (sila ketiga). Demokrasi di Indonesia harus mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bangsa (sila keempat). Demokrasi di Indonesia harus mewujudkan keadilan sosial (sila kelima). Bdk. Dr. Edison Bonar Tua Hutapea, M. Si, *Komunikasi Politik, Lingkup Kajian, konsep dan Pendekatan* (Jakarta: Gibon Books, 2020), 295.
Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial adalah nilai-nilai yang tak terpisahkan di dalam demokrasi Pancasila. Bdk. Nur Kholis Majid, "Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi," *Action Research Literate*, Vol. 8, No. 3 (Maret 2024), 513.

langsung tentang pandangan-pandangan agama dan kepercayaan di Indonesia tentang hubungan antara agama dan negara dan tentang bagaimana keterlibatan agama dan kepercayaan tersebut dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini dapat menggunakan bentuk penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang menggunakan metode *in-depth interview*.

Daftar Pustaka

Ardipandanto, Aryojati. "Dampak Politik Identitas pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme." *Politica*, Vol.11, No.1 (Mei 2020). 43-63.

Deni, H. Asep, Dr. M.M., CQM., CBA, dkk., *Pengantar Ilmu Politik*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Dua, Mikhael. "Demokrasi, Kontradiksi-Kontradiksinya, dan Epikeia, Perspektif Sejarah Filosofis Pierre Rosanvalon." *Jurnal Ledalero*, Vol.23, No.1 (Juni, 2024). 23-42.

Fukuyama, Francis. "Why is Democracy Performing So Poorly?" in Democracy in Decline?. Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015.

———————. *America at the Crossroads, Democracy, Power, and the Neoconservative Legacy*. New Haven and London: Yale University Press, 2006.

———————. *Identity, The Demand for Dignity and The Politics of Resentment*. e-book. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2018.

———————. *Our Posthuman Future, Consequences of the Biotechnology Revolution*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002.

———————. *Political Order and Political Decay, From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy*. e-book. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.

———————. *Social Capital*. The Tanner Lectures on Human Values, Delivered at Brasenose College, Oxford May 12, 14, and 15, 1997.

———————. *The End of History and the Last Man*. New York: The Free Press A Division of Macmillan, Inc., 1992.

———————. *The Great Disruption, Human Nature and The Reconstitution of Social Order*. London: Profile Books Ltd, 1999.

———————. *The Origins of Political Order, From Prehuman Times to The French Revolution*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.

———————. *Trust, The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press Paperbacks, A Division of Simon & Schuster Inc., 1995.

Gonsaga No, Alosius, dan Barnabas Ohoiwutun. "Paham Politik Identitas Menurut Francis Fukuyama (Sebuah Kajian Filsafat Moral)." *Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral*, Vol.3, No.2 (Juli 2024). 218-234.

Hutapea, Edison Bonar Tua, Dr., M. Si. *Komunikasi Politik, Lingkup Kajian, konsep dan Pendekatan*. Jakarta: Gibon Books, 2020.

JA, Denny, PhD. *Sosiologi Agama di Era Artificial Intelligence, 7 Prinsip*. Cheyenne, Wyoming, USA: Cerah Budaya Internasional, 2025.

Jabpar, Abdul. "The End of History and The last Man (Sebuah Studi Deskriptif atas Pemikiran Francis Fukuyama)." *An-Nûr Jurnal Studi Islam*, Vol.VII, No. 2 (Desember 2015). 121-145.

Majid, Nur Kholis. "Pancasila sebagai Landasan Etika Politik: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi." *Action Research Literate*, Vol.8, No.3 (Maret 2024). 509-516.

Nadjib, H. Abdul, Dr. Ir., dan MM, Muhammad Yusuf Abror, S.I.P., M.A, eds, *Dinamika Isu-Isu Sosial Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit IDEA Press, 2022.

Supratikno, Agus. "Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia." *SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan dan Teologi di Indonesia*, Vol. I, No. 1 (Juni 2023). 1-22.

Wisnu, Dinna, Ph.D, ed. *Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad Ke 21, Refleksi dari Forum Masyarakat Sipil dan Media*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2018.

Zaprulkhan. "Membangun Dialog Peradaban." *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.03, No.01 (Juli 2017). 49-66.

Bahan dari Internet

Affan, Heyder. *Seruan tidak mensalatkan pro-Ahok 'tak sesuai ajaran Islam'*. Website: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39097303. Diakses Selasa, 15 Oktober 2024.

Agama. Website: https://indonesia.go.id/profil/agama. Diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Alasan KWI Tolak Kelola Tambang Meski Direstui Jokowi. Website: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240606075014-85-1106490/alasan-kwi-tolak-kelola-tambang-meski-direstui-jokowi. Diakses Selasa, 15 Oktober 2024.

Daftar Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2024. Website: https://indonesiabaik.id/infografis/daftar-hari-libur-dan-cuti-bersama-tahun-2024. Diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Fika, Dian Rahma dan Jihan Ristiyanti. *10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia, Terbaru Minyak Mentah.* 26 Februari 2025. Website: https://www.tempo.co/ekonomi/10-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia-terbaru-minyak-mentah--1212298. Diakses pada Jumat, 16 Mei 2025.

Kemenag Patuhi dan Dukung Putusan MK tentang Aliran Kepercayaan. Website: https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-patuhi-dan-dukung-putusan-mk-tentang-aliran-kepercayaan-wllfxb. Diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Kewajiban sertifikasi resmi halal berlaku, bagaimana nasib UMKM?. Website: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50080006. Diakses Selasa, 15 Oktober 2024.

Ni'am, Syakirun. *Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia*. Website: https://nasional.kompas.com/read/2025/02/27/14210521/daftar-10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia?page=all. Diakses pada Jumat, 16 Mei 2025.

Pembukaan UUD 1945. Website: https://tni.mil.id/pages-4-pembukaan-uud-1945.html. Diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.

Presiden Jokowi izinkan ormas keagamaan kelola tambang - Rawan 'konflik SARA' dan 'alat perusahaan', kata pegiat lingkungan. Website: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1ddgk11v0yo. Diakses Selasa, 15 Oktober 2024.

Sejarah Sumpah Pemuda. Website: https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/sejarah-sumpah-pemuda/. Diakses pada Selasa, 15 Oktober 2024.